

PENDIDIKAN POLITIK GENERASI Y GUNA MENGHILANGKAN PRIMORDIALISME POLITIK

Oleh : Diana

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : diana.fisip@gmail.com

ABSTRACT

General elections (elections) such as regional head elections (elections), presidential elections (presidential elections), and legislative elections are always followed by political participants with diverse backgrounds. The diversity of backgrounds can form primordialism among voters characterized by a tendency to support candidates because of certain factors such as ethnic or religious similarities. The primordialism attitude causes voters not to look at the ability of an individual to carry out various identities in various situations.

The purpose of this study was to analyze generation Y political education in order to eliminate political primordialism. This research is a library research, where data is analyzed through deskriptif analysis.

The results of this study indicate that tribal primordialism and religion are often found during elections in several regions. This can be seen from the attitude of voters in several regions in determining their choices still adhering to kinship / family ties in this case ethnicity and religion. The strong primordialism in voters causes voters not to see the electability of candidates. This has an impact on not seeing the ability of prospective politicians in carrying out their duties and obligations when elected later. Therefore, political education is needed so that voters, especially generation Y, become politically literate. Political education can increase voter participation and awareness and make voters more rational in making their choices. In addition, political literacy resulting from political education can eliminate the negative impact of primordialism. Thus, attitudes such as joining in, being easily influenced, and easily changing candidates' choices, caused by primordialism can be eliminated.

Keywords: primordialism, political education, generation y.

ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan legislatif (pileg), selalu diikuti oleh peserta politik dengan latar belakang yang beragam. Keragaman latar belakang tersebut dapat membentuk sikap primordialisme dikalangan pemilih yang ditandai dengan kecenderungan mendukung calon karena faktor tertentu seperti kesamaan suku atau agama. Sikap primordialisme tersebut menyebabkan pemilih tidak melihat kepada kemampuan seseorang individu untuk melaksanakan berbagai identitas dalam berbagai situasi.

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pendidikan politik generasi Y guna menghilangkan primordialisme politik. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yang mana data dianalisis melalui analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa primordialisme kesukuan dan agama merupakan yang sering dijumpai saat pemilu di beberapa daerah. Hal tersebut terlihat dari sikap pemilih di beberapa daerah dalam menentukan pilihannya masih berpegang pada ikatan kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan dan agama. Sikap primordialisme yang kuat pada diri pemilih menyebabkan pemilih tidak melihat elektabilitas calon. Hal tersebut berdampak pada tidak dilihatnya kemampuan calon politisi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya saat terpilih nantinya. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik agar pemilih khususnya generasi Y menjadi melek politik. Pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih serta membuat pemilih menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihannya. Selain itu, melek politik yang dihasilkan dari pendidikan politik, dapat menghilangkan dampak primordialisme negatif. Dengan demikian, sikap seperti ikut-ikutan, mudah dipengaruhi, mudah bergonta-ganti pilihan calon, yang disebabkan oleh ikatan primordialisme dapat dihilangkan.

Kata Kunci : primordialisme, pendidikan politik, generasi y.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) baik pemilihan kepala daerah (pilkada), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan legislatif (pileg), selalu diikuti oleh peserta politik dengan latar belakang yang beragam, baik dari segi partai politik pengusung, suku, agama, daerah kelahiran, budaya, jenis kelamin, pendidikan, dan sebagainya. Keragaman latar belakang tersebut dapat membentuk sikap primordialisme dikalangan pemilih. Sikap primordialisme politik ditandai dengan kecenderungan mendukung salah satu calon karena faktor tertentu seperti kesamaan suku atau agama. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Shills dalam Sugiprawaty (2009) bahwa primordialisme terjadi dikarenakan adanya ikatan sosial. Ikatan sosial tersebut dapat berupa kesamaan daerah asal (kewilayahan), agama, budaya, bahasa, dan organisasi sosial. Sikap primordialisme ini menyebabkan pemilih tidak melihat kepada kemampuan seseorang individu untuk melaksanakan berbagai identitas dalam berbagai situasi.

Primordialisme dalam hal tradisi, etnisitas, agama, dan ideologi pada masyarakat memiliki dampak negatif dan positif. Bagi pemilih yang memiliki primordialisme kuat, dapat digunakan untuk memilih pemimpin bangsa yang berintegritas dan berkapasitas. Adapun dampak negatif dari sikap primordialisme ialah dapat menghilangkan elektabilitas calon (Kumayas dan Steven, 2015)

Sikap primordialisme dapat menyebabkan pemilih generasi Y khususnya generasi muda memilih calon politisi tidak berdasarkan kepada kemampuan calon tersebut. Selain itu, sikap primordialisme berpengaruh terhadap harmonisasi masyarakat multikultur, yaitu semakin erat sikap primordialisme pada diri seseorang maka akan semakin susah pula untuk melaksanakan pembentukan harmonisasi masyarakat multikultur (Prayitno, 2017). Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik bagi generasi Y sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan sikap primordialisme tersebut.

Menurut Horovitz (2012), generasi Y merupakan generasi yang lahir antara awal 1980 sampai dengan awal tahun 2000-an atau pemilih yang berusia 37-17 tahun. Menurut survei Alvara Research Center tahun 2014 (dalam Ali, 2015), generasi Y khususnya pemilih muda didominasi oleh pemilih galau (*swing voters*) dan pemilih cuek (*apathetic voters*). Pemilih muda tersebut sangat mudah dipengaruhi khususnya dengan hal-hal berbau primordialisme politik. Apalagi generasi Y memiliki karakteristik yang banyak menghabiskan waktunya sebagai pengguna teknologi khususnya internet (Pew Research Center dalam Ali, 2015), semakin mudah untuk terpengaruh tanpa melihat elektabilitas calon politisi tersebut. Menurut Kharisma (2015), para pemilih muda hanya sekedar ikut-ikutan serta mudah

dan rentah dimobilisasi oleh kelompok-kelompok tertentu dikarenakan pendidikan politik yang lemah.

Selain itu, sikap primordialisme generasi Y dapat dipengaruhi dari lingkungan keluarga. Misalkan orang tua mereka dalam menentukan pilihan calon politisi lebih condong dengan yang memiliki kesamaan seperti suku dan agama. Generasi Y yang merupakan pemilih muda tidak terlalu peduli dengan dunia politik. Mereka lebih memperhatikan tren terkini anak muda, sehingga dalam menentukan pilihan calon politisi mereka kerap mengikuti pendapat orang yang dipercaya seperti orang tua. Hal tersebut secara tidak langsung membentuk sikap primordialisme generasi Y. Selain itu, seseorang dapat mengubah pilihannya dengan alasan kedekatan secara primordial meskipun telah menentukan pilihan sebelumnya.

Sikap primordialisme dapat dikurangi atau dihilangkan dengan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan media penyampain konsep politik yang bertujuan untuk membuat pemilih muda menjadi melek politik. Dengan melek politik, pemilih khususnya generasi Y dapat mejadi lebih rasional dalam menentukan pilihannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan memilih calon politisi tanpa didasari sikap primordialismme.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan Politik

Menurut Surbakti (1999), dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik dibagi dua, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialog diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999). Adapun menurut Rusadi (2004) pendidikan politik ialah upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Menurut Kuntowijoyo (1994) pendidikan politik dapat berbentuk (1) pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktrinasi, dan (2) pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal, seperti melalui pertukaran pendidikan melalui mimbar bebas.

2.2. Primordialisme Politik

Menurut Wibowo dan Hardiwinoto dalam Prayitno (2017), primordialisme adalah perasaan-perasaan yang mengikat seseorang dikarenakan hal-hal yang dimilikinya sejak ia dilahirkan. Lebih lanjut, menurut Maryati (2014) primordialisme adalah ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang sangat berpegang teguh terhadap hal-hal yang dibawa sejak lahir baik berupa suku bangsa, kepercayaan, ras, adat-istiadat, daerah kelahiran, dan lain sebagainya. Berdasarkan pendapat Maryati (2014), primordialisme muncul akibat adanya perbedaan ikatan-ikatan dan keyakinan dari suku bangsa, agama, ras, dan kebudayaan yang berbeda.

2.3. Generasi Y

Menurut Horovitz (2012) Generasi Y (*Generation Y*) yang juga disebut dengan *Millennial Generation* merupakan kelompok anak muda yang berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan, yang mana lahir awal 1980 hingga awal 2000. Generasi Y memiliki beberapa karakteristik, seperti rasa memiliki terhadap komunitas yang kuat baik dalam konteks lokal maupun global; percaya diri dan toleran; serta memiliki sikap narsis (William & Neil Howe, 2000; Hoover, 2009; dan Twenge, 2007; dalam Suryadi, 2015).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), sebab data yang digunakan berupa data-data tekstual seperti buku, makalah, jurnal, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dan sumber-sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik atau masalah yang diteliti. Kemudian data dianalisis melalui analisis deskriptif yaitu data yang terkumpul dijabarkan dalam bentuk penjelasan kata-kata (Moleong, 2008).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dunia perpolitikan di Indonesia tak lepas dari unsur primordialisme. Hal tersebut disebabkan masih banyak masyarakat yang memiliki egosentrisme terhadap kebudayaan atupun agama tertentu. Misalkan, kebanyakan orang Jawa akan condong memilih pemimpinnya yang berasal dari suku Jawa pula. Contoh lainnya, orang Islam takkan memilih pemimpin selain dari agamanya. Fenomena tersebut merupakan rahasia umum dikalangan masyarakat. Hal tersebut terlihat banyaknya kasus primordialisme dari pengalaman Pemilu yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia.

Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam memilih calon politisi. Menurut Kumayas dan Steven (2015), perilaku pemilih masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow masih sangat dipengaruhi oleh ikatan-ikatan primordialisme khususnya kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan dan agama. Kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku memilih di kebanyakan wilayah Bolaang Mongondow. Primordialisme kekeluargaan Bolaang Mongondow terlihat dari kuatnya dukungan bagi calon politisi yang berlatar keluarga kerajaan, seperti marga Manoppo, Papatungan, Mokodompit, Sugeha, dan Mokoagouw. Hal tersebut sejalan pula dengan penelitian Rahim (2013) yaitu perilaku pemilih Ternate masih sangat dipengaruhi oleh oleh sistem kekerabatan/kedaerahan dalam hal ini kesukuan. Pemilih Ternate memiliki etnosentrisme yang kuat yang mengedepankan nilai-nilai kesukuan, kekerabatan, kekeluargaan, dan tradisi kedaerahan yang menjadi sebuah kekuatan politik kedaerahan. Berdasarkan Pilkada Walikota Ternate tahun 2010, mayoritas masyarakat memilih pasangan H. Burhan Abdurahman dan Arifin Djafar. Alasan masyarakat memilih pasangan tersebut karena adanya ikatan primordial/kesukuan. Masyarakat dan tokoh masyarakat menganggap bahwa putera daerahlah yang seharusnya yang menjadi pemimpin didaerahnya sendiri. Pasangan terpilih merupakan putera daerah Ternate dan dianggap pasangan yang cocok untuk memimpin Kota Ternate. Selain itu, masyarakat Ternate merasa putera daerah yang memimpin akan dapat melestarikan nilai-nilai tradisi budaya setempat (Rahim, 2013).

Primordialisme etnis juga terjadi pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007. Meskipun sentimen etnisitas semakin lemah tetapi masih dimunculkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ikatan-ikatan primordial. Hal tersebut terlihat dari dukungan etnis Makassar yang sangat dominan kepada Syahrul, serta kemampuan Amin Syam dalam memenangkan daerah-daerah yang merupakan kantong etnis Bugis. Tak hanya itu, persaingan antar etnis Bugis dan Makassar berlanjut pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2008 (Sugiprawaty, 2009).

Menurut Geertz (1973), primordialisme adalah keterikatan terhadap suatu yang diantaranya dibawa melalui kelahiran. Seorang yang dilahirkan dalam komunitas yang religius, akan memiliki keterikatan yang kuat terhadap komunitasnya, sehingga keterikatan tersebut menimbulkan emosi tertentu yang menjadi dasar tingkah lakunya dan pertimbangan lainnya (Herry, 2005). Demikian pula dengan orang yang dibesarkan dalam suatu komunitas pemakai bahasa tertentu, latar belakang kultural ini bisa menjadi sumber terbentuknya semangat primordialisme orang tersebut. Hal tersebut dapat menjelaskan banyaknya kasus primordialisme yang terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia.

Selain itu, agama juga memiliki peran bagi pemilih dalam menentukan pilihannya. Menurut Kumayas dan Steven (2015) ketika pemilihan kepala daerah terjadi di Bolaang Mongondow, tokoh agama cenderung memberikan legitimasi kepada salah satu kandidat. Hal tersebut cenderung mengarahkan pandangan politik masyarakat pada primordialisme yang mana tokoh masyarakat sebagai *patron* yang memiliki kekuasaan dan mengarahkan opini publik. Kemudian menurut Rahim (2013) masyarakat akan menjadikan seseorang (termasuk tokoh agama) sebagai panutan.

Agama dapat mempengaruhi pilihan masyarakat untuk menentukan kepemimpinan di daerahnya, baik bupati atau wali kota maupun gubernur. Meskipun banyak faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku pemilih. Akan tetapi, ada sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya (Mahendra, 2014).

Menurut Hasbullah (2011) penggunaan sentimen primordial terutama agama pada satu sisi memberikan kontribusi positif berjalannya Pilkada. Otoritas agama dianggap sebagai figur kharismatik bagi pemilih akan berfungsi sebagai elemen pemersatu. Akan tetapi, tak jarang pelibatan otoritas ataupun penggunaan simbol agama secara berlebihan akan menciptakan situasi yang berujung pada terjadinya disparitas primordialistis, sehingga menimbulkan etnosentrisme.

Kemudian, Hasbullah (2011) menyatakan dari pengalaman Pilkada yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia terlihat bahwa masyarakat memiliki pilihan sendiri, tanpa ada kaitan dengan partai atau pergeseran loyalitas politik. Karena dalam realitas politiknya secara gamblang tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap para calon yang mau diusung partai, tetapi pada konteks agama dan etnis. Riil politik menunjukkan bahwa bekerjanya mesin politik bukanlah satu kata kunci dari suksesnya Pilkada yang berlangsung, tetapi pada konteks primordialnya para calon. Lebih lanjut, penggunaan ayat-ayat suci dalam ranah politik praktis, saat kampanye misalnya, lebih banyak ditujukan untuk kepentingan memperoleh dukungan suara, bukan untuk menjelaskan makna sesungguhnya dari ayat tersebut (Hasbullah, 2011).

Banyaknya kasus primordialisme dari pengalaman pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan bahwa sistem perpolitikan di Indonesia belum bisa terlepas dari isu primordialisme, baik dari sisi calon untuk memenangkan pemilihan maupun pemilih dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi Y.

Menurut Kumayas dan Steven (2015), fenomena politik uang dan perilaku pragmatisme menguat. Pendidikan politik perlu dilakukan, dalam rangka mengatasi mengatasi fenomena pragmatisme pada masyarakat. Lebih lanjut, menurut Kharisma (2015), pendidikan politik yang belum berjalan

dengan baik menyebabkan para pemilih muda Manado dalam pileg 2014 hanya sekedar ikut-ikutan serta mudah dan rentan dimobilisasi oleh kelompok tertentu. Hal tersebut terlihat dari pemilih muda Manado dalam menentukan pilihannya tidak berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap pilihan yang dilakukan, hanya sekedar ikut-ikutan. Selain itu, bahkan banyak pemilih muda yang tidak mengetahui bagaimana sebaiknya memilih calon yang saat itu bersaing.

Menurut Elo (2008), pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan untuk menumbuhkan dan/atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara. Pelaksanaan pendidikan politik tersebut, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Lebih lanjut, Affandi dan Anggraeni (2011) menyatakan bahwa pendidikan politik merubah pola pikir masyarakat. Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang pendidikan politik, partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pun relatif rendah. Akan tetapi, ketika masyarakat menerima pendidikan politik dan memiliki pengetahuan yang banyak terkait hal tersebut, maka berdampak pada partisipasi masyarakat untuk menggunakan haknya serta lebih rasional dalam menentukan pilihan.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan politik jalur pendidikan formal dapat dilakukan di sekolah. Menurut Fajar (2015) sekolah sebagai komponen terpenting pendidikan pada dasarnya dapat dijadikan media pendidikan politik untuk menanamkan kesadaran politik generasi bangsa melalui berbagai macam bentuk program pendidikan politik baik melalui mata pelajaran PKn, kegiatan OSIS, ekstrakurikuler, maupun bentuk kegiatan lain yang terencana ataupun yang bersifat insidental yang bermaksud untuk memberikan informasi politik kepada siswa. Dengan demikian, siswa memiliki kesadaran politik yang tinggi. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Pradana (2012) bahwa pendidikan politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) membuat siswa menjadi melek politik. Siswa yang melek politik tahu dan paham akan pengetahuan sistem politik Indonesia dan bagaimana partisipasi seharusnya, serta mengetahui etika dan nilai-nilai dalam berpartisipasi politik baik. Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Branson (1999) bahwa agar partisipasi lebih bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan kompetensi seperti: pengetahuan dan pemahaman, kemampuan intelektual dan partisipatoris, karakter atau sikap mental tertentu, serta komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip fundamental demokrasi konstitusional. Melek politik yang dihasilkan dari pendidikan politik, dapat menghilangkan dampak primordialisme yang negatif. Dengan demikian, sikap seperti ikut-ikutan, mudah dipengaruhi,

mudah bergonta-ganti pilihan calon politisi, yang disebabkan oleh ikatan primordialisme dapat dihilangkan.

Meskipun demikian, pendidikan politik yang dilakukan untuk memelekan secara politik pemilih khususnya generasi Y tidak selalu berdampak positif. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan dalam pendidikan politik (Kartono, 1996), antara lain berupa:

1. Amat sulit menyadarkan rakyat akan kondisi diri sendiri yang diliputi banyak kesengsaraan dan kemiskinan, sebagai akibat terlalu lamanya hidup dalam iklim penindasan, penghisapan dan penjajahan, sehingga mereka menjadi “terbiasa” hidup dalam keseba kekurangan dan ketertinggalan. Sulit mendorong mereka ke arah konsientisasi-diri mengungkapkannya segala problema yang tengah dialami.
2. Apatisme politik dan sinisme politik yang cenderung mejadi sikap putus asa mengakibatkan rakyat sulit mempercayai usaha-usaha edukatif dan gerakan-gerakan politik yang dianggap palsu dan menina-bobokan rakyat belaka; sulit pula untuk mengajak mereka berpikir lain dengan nalar jernih. Bahkan banyak diantara masyarakat yang takut pada kemerdekaan (dirinya).
3. Dengan latar pendidikan yang rendah atau kurang, rakyat kebanyakan sulit memahami kompleksitas situasi sosial dan politik yang ada disekitarnya.
4. Para penguasa yang otoriter cenderung tidak menghendaki adanya pendidikan politik, karena mereka berkepentingan sekali dengan status quo dan pelestarian rezimnya. Partisipasi aktif dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan oleh rakyat itu tidak dikehendaki, sebab mengurangi kebebasan dan kekuatan organ-organ ketatanegaraan.

Oleh sebab itu, perlu usaha yang lebih besar dari pemerintah maupun lembaga masyarakat, partai politik, serta calon politisi dalam memberikan pendidikan politik kepada para pemilih khususnya generasi Y.

V. PENUTUP

Berdasarkan pengalaman Pemilu baik pilkada, pileg, dan pilpres yang dilakukan di beberapa daerah Indonesia, primordialisme kesukuan dan agama merupakan yang sering dijumpai. Hal tersebut terlihat di beberapa daerah, yang mana pemilih dalam menentukan pilihannya masih berpegang pada ikatan kerabatan/kekeluargaan dalam hal ini kesukuan dan agama. Sikap primordialisme yang kuat pada diri pemilih menyebabkan pemilih tidak melihat elektabilitas calon. Hal tersebut berdampak pada tidak dilihatnya kemampuan calon politisi dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya saat terpilih nantinya. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik agar pemilih khususnya generasi Y menjadi melek politik. Pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih serta membuat pemilih menjadi lebih rasional dalam menentukan pilihannya. Selain itu, melek politik yang dihasilkan dari pendidikan politik, dapat menghilangkan dampak primordialisme negatif. Dengan demikian, sikap seperti ikut-ikutan, mudah dipengaruhi, mudah bergonta-ganti pilihan, yang disebabkan oleh ikatan primordialisme dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Aggraeni, Leni. 2011. *Pendidikan Politik*. Bandung: Lensa Medai Pustaka Indonesia.
- Fajar, Wildan Nurul. 2015. Pelaksanaan Pendidikan Politik Di Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. FKIP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Ali, Hasanuddin. 2015. Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia. [www. hasanuddinali.com](http://www.hasanuddinali.com), 02 Juli. Diakses tanggal 01 agustus 2017. <https://hasanuddinali.com/2015/02/07/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/>
- Branson, M. S. 1999. *Belajar "Civic Education" dari Amerika (Terjemahan Syarifudin dkk)*. Yogyakarta: LKIS.
- Eloe, Paul Sinla. 2008. *Parpol Dan Pelaksanaan Pendidikan Politik*. <http://sumbawanews.com>, 10 Agustus. Diakses tanggal 7 agustus 2017. <http://sumbawanews.com/berita/Opini/parpol-dan-pelaksanaan-pendidikan-politik.html>.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.
- Hasbullah. 2011. Agama dan Etnisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada). *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII No. 2, Juli.
- Herry, Achmad. 2005. *Pilkada Langsung Sembilan Kunci Sukses Tim Sukses*. Yogyakarta: Galang Press.

- Horovits, Bruce. 2012. *After Gen X, Millennials, what should next generation be?*. USA: Today.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kharisma, Dwira. 2015. Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Politico*, Vol 1, No 7 (2015).
- Kumayas, Neni dan Steven Sumolang. 2015. Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Laporan Penelitian*. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mahendra, Akbar. 2014. *Budaya Politik Patrimonialisme dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
- Maryati, Kun. 2014. *Sosiologi*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Moleong, Lexi J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rusda Karya.
- Pradana, Yudha. 2012. Pengaruh Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik terhadap Pembentukan *Political Literacy* Siswa. *Tesis*. USU.
- Prayitno. 2017. Pengaruh Sikap Primordialisme Terhadap Upaya Pembentukan Proses Harmonisasi Masyarakat Multikultur Di Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
- Rahim, Hasbullah Abd. 2013. Peran Tokoh Masyarakat dalam Membentuk Perilaku Memilih pada Pemilukada Kota Ternate Tahun 2010. *Governance*, Vol 5, No 1 (2013). Diakses pada tanggal 1 Agustus 2017.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1510>

- Rusadi, Kantaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*. Edisi Revisi. Bandung: Sinar baru Algensindo.
- Sugiprawaty. 2009. Etnisitas, Primordialisme, dan Jejaring Politik Di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada Di Sulawesi Selatan Th 2007-2008). *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadi, Bambang. 2015. Generasi Y: Karakteristik, Masalah, dan Peran Konselor. *Makalah*. Dipresentasikan dalam Seminar dan Workshop Internasional MALINDO 4 di Bali, 22-23 Mei 2015 oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN).